

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Penyuluh Pertanian

Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha/upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Penyuluh pertanian adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikir, cara kerja, dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju (Kartasapoetra, 1994).

Menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang dimaksud dengan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Selanjutnya dikatakan oleh Salim, F. (2005), bahwa penyuluhan pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan nonformal di bidang pertanian, agar mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai.

Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar

dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana. L. 2005).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/Menpan/2/2008, bahwa tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan yaitu: 1) Menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan penyuluhan yang meliputi, kemampuan dalam mengidentifikasi potensi wilayah, kemampuan mengidentifikasi agroekosistem, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan teknologi pertanian, kebutuhan menyusun program penyuluhan, dan kemampuan menyusun rencana kerja penyuluhan; 2) Melaksanakan penyuluhan pertanian meliputi kemampuan menyusun materi penyuluhan, kemampuan menerapkan metode penyuluhan, baik metode penyuluhan perorangan maupun penyuluhan kelompok serta metode penyuluhan massal, juga memiliki kemampuan membina kelompok tani sebagai kelompok pembelajaran dan kemampuan mengembangkan swadaya dan swakarsa petani nelayan; 3) Kemampuan membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan; 4) Kemampuan mengembangkan penyuluhan pertanian seperti merumuskan kajian arah penyuluhan, menyusun pedoman pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan sistem kerja penyuluhan pertanian; 5) Pengembangan profesi penyuluh pertanian yang meliputi penyusunan karya tulis ilmiah dan ilmu populer bidang penyuluhan pertanian dan penerjemahan buku penyuluhan; dan 6) Kegiatan penunjang penyuluhan pertanian yang meliputi seminar dan lokakarya penyuluhan pertanian.

2.1.2. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit penunjang penyelenggaraan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) didasarkan pada pengukuran dan penilaian Pelayanan, Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana. BPP juga harus terus meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, membangun keswadayaan dan kemandirian petani serta pengusaha tani di wilayah kerjanya masing-masing. BPP mempunyai peran strategis yang harus mampu mengkoordinasikan,

mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian pada Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dengan pihak terkait lainnya.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan di tingkat kecamatan merupakan titik sentral dalam struktur organisasi penyuluhan, karena selain menerima pelimpahan tugas dan menerjemahkan kebijakan dari struktur atas, juga dituntut harus mampu memahami permasalahan dan mengakomodir aspirasi petani dan menyelenggarakan penyuluhan di wilayah kerjanya. Cakupan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, meliputi: 1). Penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan; 2). Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; 3). Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi; 4). Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 5). Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan 6). Pelaksanaan proses pembelajaran. Fungsi itu sangat tergantung pada kemampuan organisasi mengaktualisasikan kinerjanya yang digambarkan melalui program aksi yang terdiri dari pengembangan program serta implementasinya yang menjadi pedoman dan arah dalam menyediakan sumberdaya, mendukung penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini aparat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sarana prasarana, pendanaan serta status kedudukan lembaga yang kuat. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sebuah lembaga yang dekat dengan masyarakat peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan (Mokhtar, 2001).

2.1.3. Kostratani

Kostratani merupakan gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran BPP dinilai sangat strategis sebagai komponen yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Tanaman Pangan, terutama dalam hal usulan CPCL,

pengawasan tanam, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di tingkat petani, Poktan/Gapoktan.

Pada Permentan No.49 Tahun 2019 dijelaskan bahwa tugas Kostratani salah satunya adalah melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian meliputi:

- Pendataan dan penguatan data potensi pertanian di Kecamatan, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra dan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
- Penguatan pos penyuluhan desa;
- Penguatan Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani;
- Pengusulan anggaran kegiatan pembangunan pertanian
- Fasilitasi pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha; dan
- Pendampingan, pengawasan, penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pola tanam, kalender tanam, pasca panen, rencana definitif kelompok tani (RDK) atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

2.1.4. Peran BPP Kostratani

Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostratani, memiliki peran penting dalam pertanian. Ada 5 peran utama yang dimiliki Kostratani dalam pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu:

1. Sebagai pusat data dan informasi pertanian
2. Sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian
3. Sebagai pusat pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM
4. Sebagai pusat konsultasi agribisnis
5. Sebagai pusat jejaring kemitraan

Kostratani adalah gerakan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan dengan mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Kostratani adalah wujud gerakan pembangunan pertanian di Indonesia yang menyelaraskan kemajuan era industrialisasi 4.0. Kostratani berpusat di Kecamatan karena pembangunan pertanian akan dilakukan dari lapangan, Desa hingga Kecamatan.

Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di BPP merupakan pusat gerakan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi, sinergi, dan penyesuaian kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019, BPP merupakan lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai peran dalam: (a) menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; (b) melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian; (c) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; (d) mengembangkan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; (e) meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; (f) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; (g) menumbuhkembangkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan (h) mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

2.1.5. Kepuasan

Menurut Fandy Tjiptono (2014) kata “kepuasan atau *satisfaction*: berasal dari bahasa latin “*satis*” (artinya cukup banyak, memadai) dan “*facio*” (melakukan atau membuat) secara sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.

Kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembelian berkenaan dengan kesepadanan atau ketidak sepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan (Fandy Tjiptono 2014)

Menurut Sangadji dan Sopiha (2013) menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk yang real atau aktual dengan kinerja produk yang diharapkan. Secara umum, kepuasan dapat diartikan sebagai adanya kesamaan antara kinerja produk dan pelayanan yang diterima dengan kinerja produk dan pelayanan yang diharapkan konsumen. Masih menurut Sangadji dan Sopiah (2013), kepuasan konsumen dapat menciptakan dasar yang baik bagi pembelian ulang serta terciptanya loyalitas konsumen, membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan perusahaan.

2.1.6. Kriteria Dimensi Kepuasan Pelanggan

Menurut Rangkuti (2002) ada lima kriteria dimensi kepuasan pelanggan, yaitu :

1. *Tangibles* (berwujud), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan karyawan dan sarana komunikasi.
2. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
3. *Responsiveness* (ketanggapan), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik.
4. *Assurance* (keterjaminan), yaitu pengetahuan, kesopanan petugas, serta sifatnya dapat dipercaya sehingga pelanggan terbebas dari resiko.
5. *Empathy* (empati), yaitu rasa peduli untuk memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, serta mudah untuk dihubungi.

2.1.7. Petani

Petani menurut Hadiutomo (2012) adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi.

Sedangkan menurut Rodjak dalam penelitian Ester D dan R. Milyaniza (2012), petani sebagai usaha tani mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pemeliharaan tanaman yang petani tanam dan pengelolaan lahan yang mereka miliki maupun yang mereka sewa dari petani lain. Petani sebagai pengelola usahatani berarti ia harus mengambil berbagai keputusan di dalam

memanfaatkan lahan yang dimiliki atau disewa dari petani lainnya untuk kesejahteraan hidup keluarganya.

Petani yang di maksud adalah seorang atau sekelompok orang yang bercocok tanam hasil bumi atau memanfaatkan dalam kegiatan memelihara tanaman dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Dilihat dari hubungannya dengan lahan yang diusahakan maka petani dapat dibedakan atas:

- 1) Petani pemilik penggarap ialah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri dan status lahannya disebut lahan milik.
- 2) Petani penyewa ialah petani yang menggarap tanah orang lain atau petani lain dengan status sewa. Alasan pemilik lahan menyewakan lahan miliknya karena membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu singkat, atau lahan yang dimilikinya itu terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Besarnya nilai sewa lahan biasanya ada hubungan dengan tingkat produktivitas lahan usaha yang bersangkutan, makin tinggi produktivitas lahan tersebut makin tinggi pula nilai sewanya.
- 3) Petani penyakap (penggarap) ialah petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil. Produksi yang diberikan penyakap kepada pemilik tanah ada yang setengahnya atau sepertiga dari hasil padi yang diperoleh dari hasil lahan yang digarapnya.
- 4) Petani penggadai adalah petani yang menggarap lahan usahatani orang lain dengan sistem gadai. Adanya petani yang menggadaikan lahan miliknya, karena petani pemilik tersebut membutuhkan uang tunai yang cukup besar dalam waktu mendesak, tanah miliknya tersebut tidak pindah ke tangan orang lain secara mutlak. Namun, adanya hak gadai tersebut secara berangsur-angsur pindah haknya menjadi milik penggadai. Hal ini terjadi apabila uang gadai yang pertama tidak dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan.
- 5) Buruh tani ialah petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usahatani sendiri yang biasa bekerja di lahan usahatani petani pemilik atau penyewa

dengan mendapat upah, berupa uang atau barang hasil usahatani, seperti beras atau makanan lainnya.

2.1.8. Hubungan Peran BPP Kostratani dengan Tingkat Kepuasan Petani Padi

Hubungan dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai keterkaitan, dapat dikatakan bahwa hubungan adalah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya. Hubungan peran BPP Kostratani dengan tingkat kepuasan petani padi dapat diartikan sebagai suatu keterkaitan antara peran BPP Kostratani yaitu sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan dengan tingkat kepuasan petani padi. Tingkat kepuasan petani padi dapat dilihat dari bagaimana kinerja penyuluh pertanian lapangan ketika menghadapi permasalahan yang dihadapi petani.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Alat Analisis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Maksum dan Muhammad Erwan Suriatmaja "Hubungan Antara Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kepuasan Petani di Kecamatan Loa Janan Iilir Kota Samarinda"	Metode penelitian: survey Alat analisis: <i>Rank Spearman</i>	Metode penelitian dan alat analisis yang digunakan	Lokasi penelitian dan variabel yang diteliti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja PPL di Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda masuk dalam kategori cukup baik dengan skor 67,5. Petani puas terhadap kinerja PPL di Kecamatan Loa Janan Iilir dengan skor 67,35. Terdapat hubungan kuat dan signifikan antara tingkat kinerja PPL dan kepuasan petani di Kecamatan Loa Janan Iilir berdasarkan $r_{hitung} = 0,63$ dan $t_{hitung} >$

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Alat Analisis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					ttabel (5,15 > 1,68).
2.	Indah Listiana, Sumardjo, Dwi Sadono, dan Prabowo Tjiptopranoto “Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petani dalam Kegiatan Penyuluhan”	Metode penelitian: penelitian eksplanatori, pendekatan kuantitatif Alat analisis: Uji beda <i>Man Whitney</i>	Objek yang diteliti	Metode penelitian, alat analisis yang digunakan, lokasi penelitian, dan variabel yang diteliti	Tingkat kapasitas penyuluh pertanian di Provinsi Lampung berada pada kategori sedang cenderung rendah demikian halnya dengan kepuasan petani akan kegiatan penyuluhan masih rendah. Tingkat kapasitas penyuluh berhubungan sangat nyata dengan kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan. Sejalan dengan hilangnya kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten dan provinsi berarti melemahnya kapasitas penyuluh berdampak nyata pada melemahnya kepuasan petani.
3.	Wiwiek Andajani “Analisis Kepuasan Petani Bawang Merah Terhadap Kinerja Pelayanan PPL dan Penanganan Pupuk Bersubsidi	Metode penelitian: deskriptif analitik Alat analisis: Korelasi <i>Rank Spearman</i>	alat analisis, variabel yang diteliti	Lokasi dan metode penelitian, objek penelitian	Hasil dari penelitian ini yaitu petani bawang merah di desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk puas terhadap kualitas pelayanan PPL, puas dalam penanganan pupuk bersubsidi dan puas atas

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Alat Analisis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					kinerja pelayanan PPL serta puas dalam penggunaan pupuk bersubsidi.
4.	Miftakhul Arifin “Analisis Tingkat Kepuasan Petani Terhadap kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian di BP3K Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta”	Metode penelitian: survey Alat analisis: <i>Customer Satisfaction Index (CSI)</i>	Objek yang diteliti	Lokasi penelitian dan alat analisis yang digunakan	Hasil analisis CSI dalam penelitian ini yaitu nilai CSI = 82.42% atau 0.8242, kemudian dicocokkan dengan besarnya indeks kepuasan yang tertera dalam daftar indeks kepuasan, maka hasil CSI masuk pada rentang 0,81 – 1,00 dengan kategori Sangat Puas. Akan tetapi nilai CSI ini lebih dekat pada batas antara Sangat Puas dan Puas (0,81) daripada batas puncak Sangat Puas (1,00), artinya kategori Sangat Puas masih jauh dari batas puncak Sangat Puas (1,00). Dengan demikian maka harga indeks kepuasan masih perlu ditingkatkan agar mendekati nilai 1,00.

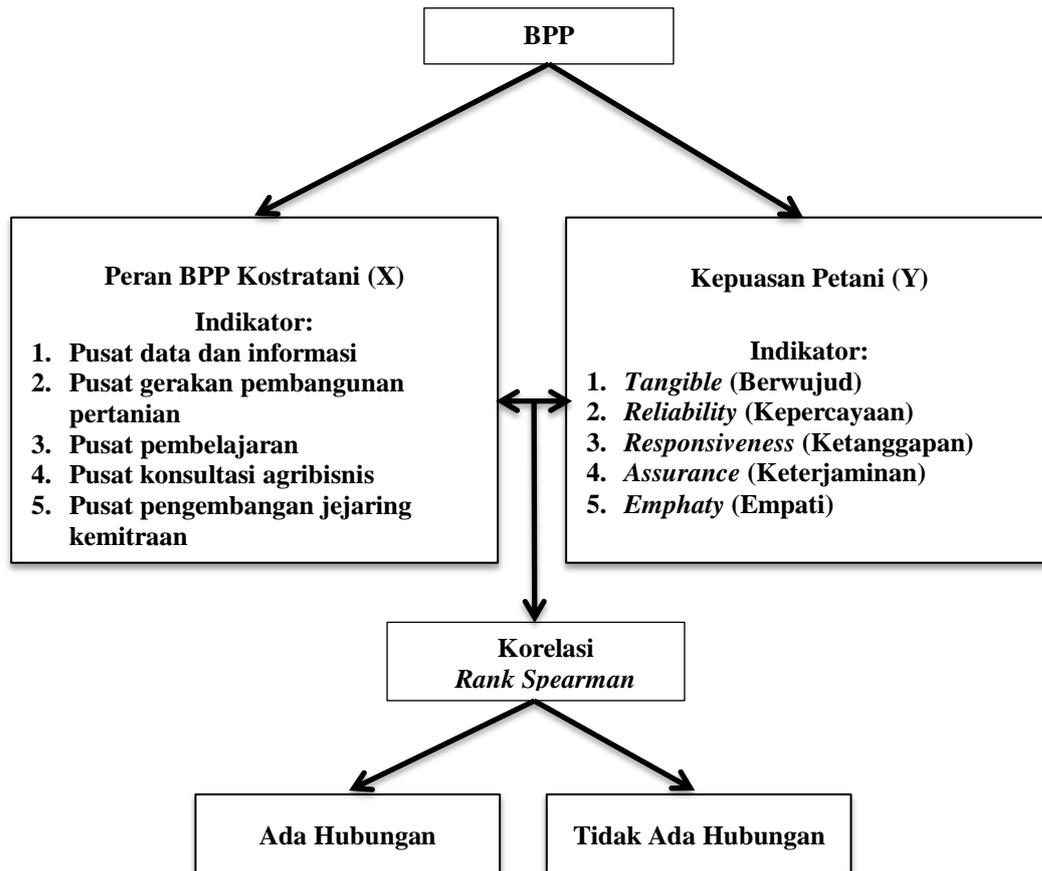
2.3. Kerangka Pemikiran

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat Kecamatan yang merupakan lembaga penyuluhan struktural yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

Menurut Rangkuti (2002) kualitas pelayanan dipengaruhi oleh lima kriteria dimensi kepuasan pelanggan, yaitu: Berwujud (*Tangible*), Kepercayaan (*Reliability*), Ketanggapan (*Responsiveness*), Keterjaminan (*Assurance*), dan Empati (*Empathy*). Dengan menilai kelima indikator tersebut dapat melihat kinerja dipihak penyuluh pertanian dan mengetahui tanggapan/kepuasan dari petani mengenai kualitas pelayanan/kinerja penyuluh pertanian. Tanggapan petani diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan petani. Untuk mengukur hubungan peran BPP Kostratani dengan tingkat kepuasan petani padi di Kecamatan Cipatujah maka digunakan Korelasi *Rank Spearman*. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk membuat kebijakan oleh kelembagaan penyuluhan dimasa yang akan datang.

Tugas BPP dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan antara lain dengan inovasi teknologi, sarana prasarana pertanian, peraturan perundang-undangan terkait pertanian, dan sumber daya manusia pertanian. Peran kostratani sebagai pusat data dan informasi, Pusat Gerakan pembangunan pertanian, Pusat konsultasi agribisnis, Pusat pembelajaran, dan Pusat pengembangan jejaring kemitraan.

BPP Cipatujah merupakan salah satu model BPP Kostratani di bawah binaan Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya. BPP Cipatujah terletak di Kecamatan Cipatujah yang merupakan salah satu kawasan sentra pertanian di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. BPP Cipatujah sebagai model BPP Kostratani, diharapkan memiliki kinerja yang meningkat dan optimal di dalam mendukung pembangunan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran dan memahami peran BPP Cipatujah setelah bertransformasi menjadi BPP Kostratani di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran, maka untuk identifikasi masalah kesatu dan kedua tidak dihipotesiskan, karena akan dianalisis secara deskriptif, sedangkan untuk identifikasi masalah yang ketiga hipotesisnya adalah ada hubungan antara peran BPP Kostratani Cipatujah dengan tingkat kepuasan petani padi.